

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “terbatas” terbatas diperseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Pada awalnya perseroan terbatas ini diatut dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kerana undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007).

Menurut pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas, adalah sebagai berikut:

“ Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Bila dikaji ketentuan diatas, dapat diuraikan bahwa perseroan terbatas harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Badan hukum

Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan kalau perseroan terbatas adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), artinya harus dilakukan minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris, dan setiap pendiri wajib menjadi bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini adalah merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas.

c. Melakukan kegiatan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal, yang selanjutnya modal perseroan terbagid dalam saham.

d. Modal dasar

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal seperti dikemukakan diatas harus terbagi dala suatu saham. Modal dasar ini disebut juga “modal statute”. Dalam bahasa inggris disebut “*authorized capital*”. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari hata kekayaan pribadi sendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut sistem tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian harus dibuat didepan akata notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan HAM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permodalan dan Saham Perseroan

Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk bagi perseroan terbatas karena modal merupakan sarana kelangsungan hidup maupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, khusus yang berkaitan dengan modal, ditentukan sebagai berikut:

1. Besar modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00
2. Modal yang ditempatkan paling sedikit 25 % dari modal dasar.
Modal yang disetor paling sedikit 25% dari modal yang ditempatkan.
3. Undang-undang mengatur klasifikasi saham dapat lebih dari satu.
Dengan dianutnya sistem klasifikasi ini, muncul bermacam variasi pemegang saham, yaitu:
 - a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
 - b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris
 - c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
 - d. Saham yang memberikan hak pada pemegangnya untuk menerima divenden lebih dahulu dari pemegang saham



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
4. Undang-undang perseroan terbatas mengatur pecahan nilai nominal saham.
5. Perlindungan kepada pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal.²⁰

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.²¹ Hingga terakhirnya lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, h. 48

²¹ Salim HS dan Budi Sutris, *Op.Cit*, h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* (yang dapat dipertukarkan). Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.

Didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal menyatakan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun pemodal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. sedangkan pada ayat 2 juga menerangkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemodal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dan pada ayat 3 penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²²

²² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²³

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Kelima hal ini disajikan berikut ini.

1. Investasi berdasarkan aset

Investasi berdasarkan aset merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan aset dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Real asset*, dan
- b. *Financial asset*.

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktifitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainya terletak pada liquiditas.

²³ Ana Rokhmatussa'dyah, SH, MH, *op.cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian likuiditas disini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu asset menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah. *Real asset* secara umum kurang liquid daripada asset keuangan.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya.

Investasi menurut pengaruhnya adalah investasi yang didasarkan pada factor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi autonomic (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
 - b. Investasi induced (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti Bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.
- #### 3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), dan
- b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Semestara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Investasi portofolio, dan
- b. Investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.²⁴

Istilah modal dalam negeri berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *domestic capital*. Pengertian modal dalam negeri dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.²⁵

C. Ketentuan nilai investasi dan permodalan

Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tatacara Prinsip Penanaman Modal menerangkan batas ketentuan nilai investasi dan permodalan penanam modal dalam negeri maupun asing yang tertera pada pasal 13 yaitu:

²⁴ Salim HS.SH,MH, *Op.Cit.*, h. 38

²⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perusahaan PMA²⁶ wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh izin prinsip.
2. Perusahaan PMDN²⁷ dalam rangka memperoleh izin prinsip tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.
3. Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali harus memenuhi ketentuan:
 - a. Total nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), diluar tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) kabupaten/kota, khusus untuk sector industry.
 - Untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI didalam 1 (satu) kabupaten/kota, diluar sector industry.

²⁶ Penanama Modal Asing

²⁷ Penanam Modal Dalam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- c. Untuk perluasan 1 (satu) atau lebih bidang usaha dalam 1 (satu) subgolongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas atau yang mendapatkan fasilitas diluar sector industry, di 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- d. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentasi kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi perusahaan PMA yang telah memiliki Izin Prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang akan mengajukan permohonan:

- a. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, dan
- b. Izin prinsip perluasan.

Wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan menjadi sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada saat pengajuan permohonan.

5. Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. Asas dan Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri

(1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keterbukaan

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan;

Asas yang mendorong peran penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Efisiensi berkeadilan;

Asas yang mendasari pelaksanaan modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Berkelanjutan;

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan lingkungan;

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri dari masuknya modal asing dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.²⁸

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional;

²⁸ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

E. Bidang Usaha Penanaman Modal

Menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 bidang usaha adalah semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,

²⁹ Undang-undang , *Op.Cit.*, pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.³⁰

Pada dasarnya semua bidang usaha untuk menanamkan investasi dengan modal dalam negeri terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta, meliputi pula bidang-bidang yang perlu di pelopori atau dirintis oleh pemerintah (pasa 4 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri). Bidang usaha negara, meliputi terutama bidang-bidang yang perusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pasal 9 Undang-undang No 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah ditentukan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). Bidang usaha itu meliputi rehabilitasi, pembaharuan, peluasan, dan pembangunan dalam bidang:

1. Pertanian;
2. Perkebunan;
3. Kehutanan;
4. Perikanan;
5. Peternakan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pengangkutan;

³⁰ *Ibid*, Pasal 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Perumahan rakyat;
10. Kepariwisata;
11. Sarana dan prasarana; dan
12. Usaha produktif lainnya.

Walaupun kedua belas bidang usaha itu dibolehkan untuk investasi dalam negeri, dalam ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah diatur tentang bidang usaha yang tertutup mutlak untuk investasi, apakah itu domestic maupun asing. Hal ini dapat kita baca dalam keputusan presiden No 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.³¹

Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan investasi, baik oleh investor asing maupun investor domestic. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang di usahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Didalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, baik investasi domestic maupun investasi asing, yang meliputi:

- a. Produksi senjata

³¹ Salim, HS, *Op.Cit*, h. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mesiu
- c. Alat peledak
- d. Peralatan perang
- e. Barang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Penjabaran lebih lanjut dari perintah pasal 12 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Daftar Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Dalam lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 telah diatur rinci tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup. Ada 25 daftar usaha yang tertutup, baik untuk investasi domestic maupun investasi asing.

Kedua puluh lima daftar bidang usaha tertutup untuk investasi yaitu:

1. Perjudian
2. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keratin, prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut, dan sebagainya).
3. Museum
4. Pemukiman, lingkungan adat
5. Monument



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Objek ziarah (tempat peribadatan, petilasan, makam, dan sebgainya)
7. Pemanfaatan (pengambilan) koral alam)
8. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix 1
9. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit satelit
10. Lembaga penyiaran public (LPP) radio dan televisise
11. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal
12. Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
13. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang
14. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor
15. Telekomunikasi/ sarana bantu navigasi
16. Vessel traffic informational system (VTIS)
17. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
18. Pemanduan lalu lintas udara (ATS) provider
19. Industry bahan kimia yang dapat merusak lingkungan
20. Indusrti bahan kimia Skedul 1 konvensi senjata kimia
21. Industry minuman mengandung alcohol
22. Industry pembuat cholr alkali dengan bahan mengandung merkuri
23. Industry siklamat dan sakarin
24. Industry logam dasar bukan besi
25. Budidaya ganja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sector yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modlanya, bidang usha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Daftar nidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini telah ditentukan dalam lampiran II peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang udaha yang tertutp dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.³²

F. Fasilitas penanam modal

Fasilitas penanaman modal adalah hal yang biasa dilakukan untuk menarik penanam modal. Undang-undang penanaman modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24.

³² Erlina, *Op.Cit*, h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan memberikan fasilitas kepada pananam modal yang melakukan penanaman modal berupa:

1. Melakukan peluasan usaha;
2. Melakukan penanaman modal baru

Adapun penanaman modal yang dilakukan tersebut harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Menyerap tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pebangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industry pionir;
6. Berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, atau industry yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria itu telah dipenuhi, maka dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada inestor.



Ada sepuluh bentuk atau kemudahan yang diberikan kepada investor, baik itu investor domestic maupun investor asing. Kesepuluh fasilitas itu adalah:

1. Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi didalam negeri;
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu;
4. Pembebasan atau penanguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau impor barang modal;
5. Penyusunana atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringanan PBB.

Selain fasilitas tersebut diatas, pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

1. Hak atas tanah
2. Fasilitas pelayanan keimigrasian
3. Fasilitas perizinan impor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasilitas-fasilitas yang dimaksud diatas hanya diberikan terhadap penanam modal asing yang berbentuk perseroan terbatas (PT).³³

G. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal

Dalam undang-undang No 25 Tahun 2007, dalam bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 14 menerangkan bahwa para penanam modal berhak untuk:

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan
3. Hak pelayanan

³³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban penanam modal diatur dalam pasal 15 Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal yaitu setiap penanam modal berkewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanam modal
4. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan tanggung jawab penanaman modal diatur dalam pasal 15 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.